

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Disusun Oleh:

NAMA : RAHMAT RAHIM
NPM : 1963002023
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister
Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2021**

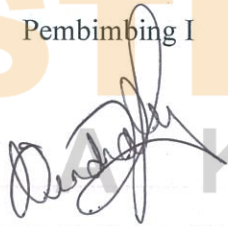
**PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	: Rahmat Rahim
NPM	: 1963002023
Jurusan	: Administrasi Publik
Program Studi	: Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	: Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia)	: Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM
Judul Tesis (Bahasa Inggris)	: Factors Affecting the Quality of Financial Reporting of Ministry of Energy and Mineral Resources

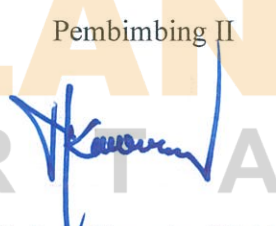
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Windraty A. Siallagan, SE, M.A., Ph.D.)

Pembimbing II



(Dr. R. Luli Karunia, SE.Ak., MA)

**PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : RAHMAT RAHIM
NPM : 1963002023
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TESIS : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN ESDM

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 5 November 2021
Pukul : 07.00 – 08.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Edy Sutrisno, M.Si.
Sekretaris : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si
Anggota : Dr. Subandi, MM
Pembimbing 1 : Windraty A. Siallagan, SE, M.A., Ph.D
Pembimbing 2 : Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak., MA



Handwritten signatures of the examiners in blue ink, corresponding to the names listed in the table.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Rahim
NPM : 1963002023
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dirujuk maupun yang dirujuk telah peneliti nyatakan dengan benar.

Jakarta, November 2021

Yang Membuat Pernyataan,



(Rahmat Rahim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang tiada berkesudahan atas kebesaran, keagungan, dan kemuliaan-Nya sehingga rangkaian tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam yang tiada pernah terputus sampai ke akhir zaman kepada sang pemimpin sejati, Nabi Muhammad SAW, yang beserta para Sahabatnya memberikan pencerahan kepada semesta.

Tesis ini berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Kementerian ESDM”. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Magister Terapan Administrasi Publik pada Program Studi Pasca Sarjana Politeknik STIA LAN Jakarta.

Melalui tesis ini, Peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Hajerah Karim dan Ayahanda Alm. Abd Rahim B yang telah mencurahkan kasih sayang, dan menjadi teladan dalam hidup ini, juga kepada Istriku Nur Rezeki Asrifa Salam dan Anakku Fatih Razi Alhanan serta saudara-saudaraku, Muhammad Taufik dan Meity Ardhia Putri. Terima kasih atas dukungannya, semua ini untuk kalian. Begitu pula pujian dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti haturkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak Dr. Asropi, S.Ip., M.Si, selaku Ketua Prodi APN Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Ibu Windraty A. Siallagan, M.A., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak., MA, selaku Dosen Pembimbing II yang terus memberikan dukungan dan arahnya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Edy Sutrisno, SE., M.Si, Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M.Si, dan Bapak Dr. Subandi, MM selaku Dosen Pembahas.
5. Para Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah mengajar dan memberikan pencerahan terutama dalam bidang administrasi negara.

6. Para Staf dan Karyawan Politeknik STIA LAN Jakarta terutama kepada Mba Mega dan Mba Fidha yang telah banyak membantu sehingga urusan peneliti menjadi lancar.
7. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Kepala Biro Keuangan beserta jajaran yang telah mengizinkan melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
8. Para Informan penelitian yang bersedia menyediakan waktunya untuk wawancara.
9. Rekan-rekan para Analis Pengelolaan Keuangan APBN di lingkungan Kementerian ESDM.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Program Magister Politeknik STIA LAN Jakarta khususnya konsentrasi MKN dan MKP, *keep it up guys!*
11. Teman-teman satu bimbingan tesis, Mba Indah dan Bu Desta. Sehat dan sukses selalu untuk kalian.
12. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang peneliti tidak dapat sebutkan satu per satu. Terima kasih semuanya.

Pada akhirnya, sebagai hasil buah pemikiran manusia, tesis ini pastinya masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi pengembangan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Jakarta, November 2021

Rahmat Rahim

ABSTRAK

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Rahmat Rahim, Windraty A. Siallagan, R. Luki Karunia

rahmatrahim@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pada Kementerian ESDM dengan menggunakan pendekatan Agensi Teori. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara kepada 15 informan, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM berdasarkan karakteristik kualitatif sudah baik dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari tim pemeriksa eksternal, namun masih diperoleh kelemahan-kelemahan pada aspek relevan dan dapat dipahami. Terdapat empat kelemahan yang menjadi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM. Pertama, adalah kompetensi sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Kedua, sinergi antara penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ketiga, pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi membutuhkan sinergi yang baik antar operator. Penelitian ini merekomendasikan untuk disusun petunjuk teknis terkait tata cara penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kementerian ESDM dan perlunya unit khusus yang menangani pengendalian intern. Selain itu peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan terkait analisis pengelolaan keuangan negara dan pelaporan keuangan.

Kata kunci: laporan keuangan; kompetensi sumber daya manusia; pengendalian intern; sistem informasi akuntansi.

ABSTRACT

Factors Affecting the Quality of Financial Reporting of Ministry of Energy and Mineral Resources

Rahmat Rahim, Windraty A. Siallagan, R. Luki Karunia
rahmatrahim@gmail.com

Polytechnics of National Institute of Public Administration
Jakarta, Indonesia

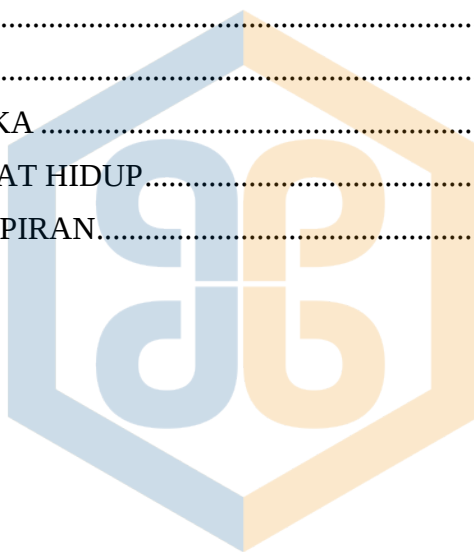
This study aims to investigate the condition of financial reporting process, explain its affecting factors, and propose recommendation to improve the quality of financial reporting of Ministry of Energy and Mineral Resources Indonesia by using the Agency Theory approach. This study used a qualitative research method with a case study approach. Data were collected through interview with 15 informants, observation, and document review. The results show that the quality of the Ministry of Energy and Mineral Resources financial reports based on qualitative characteristics is good with the obtaining of Unqualified Opinions from Indonesian Audit Board, but weaknesses in relevant and understandable aspects still remain. The weaknesses in the factors that affect the quality of the Ministry of Energy and Mineral Resources financial reporting are as follow: first, the competence of human resources need to be improved continuously. Second, the implementation of Internal Control over Financial Reporting (PIPK) needs to be synergized with the implementation of the Government Internal Control System (SPIP). Third, utilization of information technology-based accounting information systems requires good coordination between users. Fourth, a strong leadership commitment is indispensable to improve the quality of financial reporting and communication related to accounting transaction procedures and business processes. There are two recommendations to improve the quality of financial reporting, first ministry have to compile modules or technical instructions related to how to make financial reporting and managing accounts. Second, creating a special unit to handle internal control over risk reporting to make it synergized. In addition, it is recommended to improve the analytical thinking for financial reporting administrator and increase understanding related to state financial management.

Keywords: financial report; human resources; internal control; accounting information system.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I	1
PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Permasalahan	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	15
B.1 Tinjauan Kebijakan	15
B.2 Tinjauan Teori	26
C. Kerangka Berpikir	40
BAB III	43
METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Metode Penelitian	43
B. Teknik Pengumpulan Data	46
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48

D. Instrumen Penelitian.....	49
BAB IV	51
PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Hasil Penelitian	52
BAB V.....	99
SIMPULAN DAN SARAN	99
A. Simpulan	99
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	115



POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Temuan Pemeriksaan SPI oleh BPK RI Pada LKPP dan LK Kementerian ESDM Tahun 2017-2019.....	6
Tabel 3.1	Linimasa Penelitian.....	46
Tabel 3.2	Rincian Responden Penelitian.....	48
Tabel 4.1	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian ESDM Periode Tahun 2017-2019.....	58



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rekapitulasi Jumlah Temuan Pemeriksaan BPK RI Pada Kementerian ESDM Tahun 2017-2019.....	5
Gambar 2.1	Kerangka Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Pusat...	20
Gambar 2.2	Aplikasi Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat...	22
Gambar 2.3	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	32
Gambar 2.4	Visualisasi PIPK.....	37
Gambar 2.5	Kerangka Berpikir.....	43
Gambar 3.1	Model Analisa Data.....	49
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Biro Keuangan Kementerian ESDM...	53
Gambar 4.2	Tangkapan Layar Rapat Pimpinan Yang Membahas Realisasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian ESDM Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir.....	57
Gambar 4.3	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2019.....	62
Gambar 4.4	Tampilan Perbandingan Penyajian Pada Laporan Keuangan Kementerian ESDM.....	66
Gambar 4.5	Tampilan Perbandingan Penyajian Pada Laporan Keuangan Kementerian ESDM.....	67
Gambar 4.6	Tangkapan Layar Publikasi Laporan Keuangan Kementerian ESDM Pada Website Kementerian ESDM....	71
Gambar 4.7	Telaah Dokumen Akun Signifikan Kementerian ESDM Tahun 2018.....	80
Gambar 4.8	Tahapan Penerapan PIPK Kementerian ESDM.....	82
Gambar 4.9	Contoh Pernyataan Reviu PIPK Kementerian ESDM.....	83
Gambar 4.10	Daftar Hasil Pemeriksaan SPI Kementerian ESDM.....	84
Gambar 4.11	Alur Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Pusat.....	90

Gambar 4.12	Siklus Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.....	91
-------------	---	----



POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....	115
Pedoman Observasi.....	119
Pedoman Telaah Dokumen.....	120



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APK	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
BMN	Barang Milik Negara
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BUD	Bendahara Umum Daerah
BUN	Bendahara Umum Negara
COSO	<i>Committee of Sponsoring Organizations</i>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
IP	Indeks Profesionalitas
K/L	Kementerian Negara/Lembaga
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	Laporan Hasil Reviu
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
PIPK	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

SDM	Sumber Daya Manusia
SIA	Sistem Informasi Akuntansi
UU	Undang-Undang
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian



POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek sentral dalam pelaksanaan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan negara. Pemerintah dituntut dapat mengelola keuangan negara secara cepat, transparan dan akuntabel, dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan. Hakikatnya masyarakat ingin mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah menjalankan tugas dan fungsinya terkait pengelolaan keuangan negara dengan baik dan peruntukannya diberikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat (Nasution et al., 2019).

Upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pertanggungjawaban keuangan negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Bab II terkait Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan bahwa “Menteri Keuangan, Menteri/Setingkat Menteri, dan Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD”. Selanjutnya dilakukan pengaturan bahwa laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang memiliki prinsip berterima umum dan tepat waktu.

Pelaporan keuangan pemerintah bukan hanya mencerminkan kondisi keuangan negara, namun juga merefleksikan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas minimal harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu: (1) relevan yang dicirikan memiliki manfaat umpan balik dan prediktif untuk menjadi basis pengambilan keputusan, (2) andal yang dicirikan tidak mengandung kesalahan yang material, (3) dapat dibandingkan yang dicirikan dengan perbandingan dengan laporan keuangan sejenis maupun perbandingan periodisitas, dan (4) dapat dipahami yang dicirikan pengguna laporan keuangan memahami secara memadai apa isi dari laporan keuangan tersebut (Mardiasmo, 2018, p. 181).

Untuk membuktikan dan menguji validitas serta kewajaran pelaporan keuangan pemerintah serta sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan selaku eksternal auditor pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui laporan keuangan secara berjenjang dari tingkat Kementerian/Lembaga (LKKL), Bendahara Umum Negara (LKBUN) hingga konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk opini atas laporan keuangan yang mempertimbangkan empat kriteria, yaitu: (1) kesesuaian dengan SAP yang menilai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP yang merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah (2) Efektivitas sistem pengendalian internal yang menilai apakah pengelolaan risiko telah memadai untuk mencapai tujuan organisasi (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menilai bahwa pengelolaan sumber daya tidak melanggar peraturan/ketentuan hukum yang berlaku, dan (4) Pengungkapan yang memadai yang menilai bahwa penyajian sepenuhnya telah diungkapkan dengan memadai, aspek ini erat kaitannya dengan kesesuaian dengan SAP (Sudiaranti et al., 2015).

Salah satu kementerian yang dibentuk oleh Presiden adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Peraturan

Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa “Kementerian ESDM merupakan salah satu kementerian/lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

Pada tahun 2019 Kementerian ESDM memiliki 12 unit eselon satu dengan total realisasi anggaran belanja sebesar Rp4,7 triliun dan total realisasi PNBP sebesar Rp172,9 triliun. Berdasarkan data dari Biro Sumber Daya Manusia, jumlah pegawai sebanyak 6.035 orang. Dari jumlah tersebut pegawai yang memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara pada Kementerian ESDM kurang lebih sebanyak 168 orang yang terbagi menjadi beberapa kategori pekerjaan seperti pengelolaan keuangan negara baik dari sisi pendapatan maupun belanja, pengelolaan aset, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil prastudi terhadap dokumen kepegawaian dari Biro Sumber Daya Manusia, dilihat dari tataran kompetensi SDM yaitu salah satunya adalah latar belakang pendidikan. Para pengelola keuangan di Kementerian ESDM cukup heterogen, mayoritas pengelola keuangan berlatar belakang pendidikan nonekonomi bahkan nonsosial yang berkisar pada angka 60%, namun disisi yang berbeda terdapat pegawai dengan latar belakang ekonomi yang memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Di samping itu, temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian ESDM Tahun 2017-2019 mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK periode tahun 2017-2019 Kementerian ESDM memperoleh opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan/temuan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan negara tersebut. BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah,

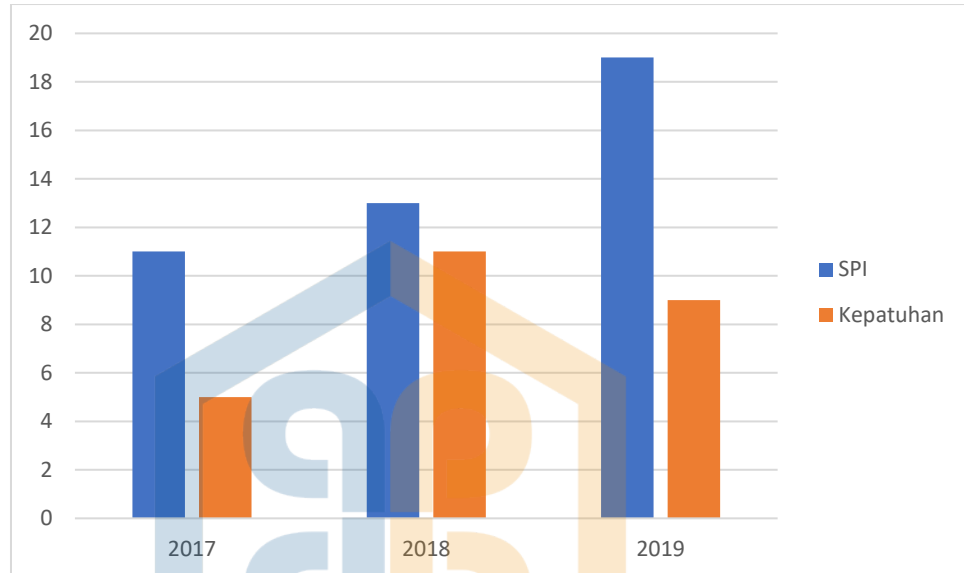
melakukan pemeriksaan dan mengungkapkan dua jenis temuan, yaitu terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Safitri & Darsono, 2015).

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pemeriksaan atas SPI meliputi pengelolaan risiko yang dimiliki entitas yang diperiksa, serta kecukupan atas pengelolaan risiko tersebut dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sementara pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi kesesuaian antara pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data LHP BPK atas LK Kementerian ESDM periode 2017-2019 menunjukkan bahwa jumlah temuan pemeriksaan mengalami tren peningkatan, dimana jumlah temuan pada aspek SPI pada tahun 2017 berjumlah 11 temuan, pada tahun 2018 berjumlah 13 temuan dan pada tahun 2019 berjumlah 19 temuan. Hal yang sama terjadi pada temuan pemeriksaan pada aspek kepatuhan perundang-undangan, pada tahun 2017 berjumlah 5 temuan, pada tahun 2018 berjumlah 11 temuan dan pada tahun 2019 berjumlah 9 temuan (data diolah dari LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM 2017-2019).

Bila diambil rata-rata dari total jumlah temuan pemeriksaan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, maka jumlah temuan SPI memiliki presentase yang lebih tinggi dibandingkan temuan kepatuhan yaitu sebesar 63% dan terus mengalami tren kenaikan sebesar 32% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan temuan pemeriksaan pada tingkat LKPP dimana pada periode 2017-2019 temuan SPI memiliki kontribusi sebesar 77% dari total seluruh temuan pemeriksaan.

Gambar 1.1
Rekapitulasi Jumlah Temuan Pemeriksaan BPK RI
Pada Kementerian ESDM Tahun 2017-2019



Sumber: LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM

Hal tersebut mengindikasikan bahwa aspek SPI yang meliputi pengadministrasian, penatausahaan, dan pengelolaan keuangan negara belum memadai. Masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu menjadi perhatian khusus pemerintah, karena sejak tahun 2017 pemerintah telah menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang bertujuan untuk memastikan bahwa pernyataan tanggung jawab pada laporan keuangan baik tingkat LKKL hingga LKPP yang ditandatangani oleh menteri/setingkat menteri yang menyatakan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan pengendalian intern yang memadai namun secara faktual di lapangan mencerminkan hal yang sebaliknya.

Disamping itu aspek SPI merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan negara, hal tersebut dibuktikan bahwa pelaksanaan SPI menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang kemudian diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 bahwa SPI adalah proses integral yang dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh lapisan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Secara umum, permasalahan SPI yang terdapat pada laporan keuangan Kementerian ESDM terjadi juga pada tingkat LKPP. Berdasarkan LHP BPK pada aspek SPI periode pemeriksaan tahun 2017-2019 pada LK Kementerian dan LKPP adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Temuan Pemeriksaan SPI oleh BPK RI
Pada LKPP dan LK Kementerian ESDM Tahun 2017-2019

No	Periode Pemeriksaan	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	Laporan Keuangan Kementerian ESDM
1	2017	Temuan terkait dengan belum memadainya pengelolaan kas pada 28 kementerian negara/ lembaga (K/L), belum tertibnya penatausahaan dan pencatatan persediaan pada 51 K/L, dan belum tertibnya penatausahaan dan pencatatan aset tetap pada 72 K/L	Temuan terkait belum memadainya Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA), belum memadainya penatausahaan piutang, belum memadainya penatausahaan aset tetap, dan belum tertibnya penatausahaan kewajiban
2	2018	Temuan terkait belum memadainya pengendalian atas pengelolaan persediaan pada K/L, belum memadainya pengendalian atas	Temuan terkait belum tertibnya penatausahaan PNBP SDA, belum memadainya penatausahaan piutang, belum tertibnya penatausahaan persediaan, belum tertibnya

		pengelolaan aset tetap pada K/L	penatausahaan aset tetap dan aset lainnya
3	2019	Temuan terkait ketidaksesuaian pencatatan persediaan dengan ketentuan, belum memadainya pengendalian atas pengelolaan aset tetap pada 77 K/L yang berdampak adanya saldo yang tidak akurat serta penatausahaan dan pencatatan aset tetap yang tidak sesuai ketentuan pada 53 K/L	Temuan terkait belum memadainya penatausahaan PNBP, kesalahan penganggaran belanja tidak sesuai dengan perencanaan, belum tertibnya penatausahaan persediaan dan aset tetap

(Diolah dari LHP LKPP dan LHP KESDM tahun 2017-2019).

Berdasarkan tabel di atas, temuan pemeriksaan SPI yang terjadi khususnya pada Kementerian ESDM adalah permasalahan yang berulang. Hal ini tentunya memerlukan perbaikan, dimana masih terdapat indikasi kualitas laporan keuangan yang belum optimal. Tidak optimalnya kualitas laporan keuangan tersebut yang dicerminkan dari karakteristik kualitatif laporan keuangan, yakni sebagaimana termaktub dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan prastudi terhadap dokumen awal berupa LHP BPK atas laporan keuangan Kementerian ESDM, untuk aspek dapat dibandingkan dan dapat dipahami tidak memiliki permasalahan khusus. Hal ini disebabkan secara umum kebijakan, peraturan dan sistematika pelaporan keuangan pemerintah pusat sudah dilaksanakan secara terpusat mengikuti Kementerian Keuangan

selaku Bendahara Umum Negara dan konsolidator LKPP. Namun hal berbeda terjadi untuk aspek relevan dan andal, berdasarkan data LHP BPK Tahun 2017-2019 menunjukkan kelemahan-kelemahan penyajian laporan keuangan Kementerian ESDM. Realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan serta kelemahan pengelolaan PNBPN menunjukkan aspek relevansi laporan keuangan menjadi berkurang. Manfaat atas belanja serta PNBPN memiliki ketidakpastian, prediksi atas potensi masa depan menjadi tergerus akibat pengelolaan yang kurang memadai, tentu hal ini dapat berdampak signifikan mengingat Kementerian ESDM selaku kementerian penyumbang PNBPN terbesar secara nasional.

Hal serupa terjadi pada aspek keandalan suatu laporan keuangan. Pengelolaan dan penatausahaan aset yang belum tertib dan memadai menjadi preseden kurang baik, jumlah secara nominal yang tercantum pada laporan keuangan maupun eksistensi suatu aset menjadi pertanyaan apakah dapat diyakini.

Apabila hal tersebut terus-menerus terjadi dapat menurunkan kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM yang dapat berdampak pada opini BPK atas laporan keuangan yang merupakan gambaran kewajaran atas suatu laporan keuangan yang dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi, cukupnya pengungkapan informasi, kepatuhan atas regulasi dan perundang-undangan, serta pelaksanaan SPI yang efektif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) yang berdampak pada menurunnya kinerja organisasi dan turunnya kepercayaan publik (Nurrizkiana et al., 2017).

Berdasarkan uraian data di atas, penelitian ini mencoba menelusuri lebih jauh terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM dengan fokus penelitian kepada SPI karena dengan efektifnya pelaksanaan SPI maka secara tidak langsung akan mematuhi ketaatan terhadap perundang-undangan. Sebagai Analisis Pengelolaan

Kuangan APBN pada instansi tersebut, peneliti berharap dapat memberikan gambaran secara ilmiah bagaimana kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memitigasi faktor-faktor yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan prastudi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kementerian ESDM Tahun 2017-2019, menunjukkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM, sebagai berikut:

1. Karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana pada Standar Akuntansi Pemerintahan belum sepenuhnya terpenuhi, terutama untuk aspek relevan dimana beberapa temuan seperti kelemahan pengelolaan PNPB dan tidak sesuainya antara perencanaan dan realisasi belanja menjadi indikasi relevansi laporan keuangan yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan menjadi tidak optimal. Serta aspek andal dimana temuan terkait pengelolaan aset berupa piutang, persediaan dan aset tetap yang belum memadai mencerminkan nominal saldo yang tertera di laporan keuangan Kementerian ESDM diindikasikan kurang andal dan akurat.
2. Latar belakang SDM pengelola keuangan khususnya terkait pelaporan keuangan di Kementerian ESDM yang cukup beragam dapat menjadi inidikasi kelemahan dalam proses pelaporan keuangan.
3. Sistem pengendalian intern merupakan komposisi temuan pemeriksaan terbesar dan secara simultan mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2017-2019.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembahasan penelitian ini akan dibatasi pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah laporan keuangan Kementerian ESDM telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan?
2. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM?
3. Bagaimana meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM dengan menggunakan karakteristik kualitatif laporan keuangan pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Mengidentifikasi dan menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM.
3. Memberikan alternatif solusi/mechanisme untuk peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan yang ada terhadap literatur terkait kualitas laporan keuangan terutama pada tingkat kementerian/lembaga. Dimana penelitian terdahulu didominasi oleh penelitian terkait kualitas laporan keuangan pada tingkat pemerintah daerah. Di samping itu sebagai dukungan peneliti terhadap

pengembangan ilmu akuntansi dan pelaporan keuangan khususnya sektor pemerintah pusat.

2. Dari aspek praktisi, merupakan sumbangan pemikiran peneliti bagi Kementerian ESDM untuk melihat sejauh mana faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan terkait peningkatan kualitas laporan keuangan, baik kebijakan yang sudah ada atau yang akan diambil dan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran bagi kementerian/lembaga lain yang memiliki karakteristik serupa dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan.

